

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Adrian sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bohari, 1992, *Pengawasan Keuangan*, Rajawali, Jakarta.
- Deddy,Mulyadi, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dody Setyawan,2017, Pengantar Kebijakan Publik, cetakan pertama, Intelegensia media, Malang.
- Johnny ibrahim.2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang. Banyumedia Publishong.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.
- Nuriyanto A. Daim, 2019, *Hukun Perizinan Pelayanan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Prajudi Admosudirjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Galadia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Samsul Wahidin, 2013, *Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soebarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusnani Hasyimzoe dkk, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Kedua, Rajawali Press, Depok.

Yusnani Hasyimzum, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*.

B. Hasil Penelitian (skripsi/thesis/disertasi/jurnal)

Ali Kurnia Widi, *Implementasi Perizinan Penanaman Modal di Kota Mataram*, *Dialogia iuridica*, volume 9 Nomor 2.

Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Administrasi : Suatu Studi Komparasi*, *Administrative Law & governance Journal*, Volume 2 Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Permenkes no: 86/Men.kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166. Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluarsa Pada Penandaan/Label, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

D. Internet

<https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada tanggal 3 Juni 2020

<https://www.suaraindonesia.co.id/read/10402/20191010/084955/sidak-karaoke-camp039us-888-dprd-jember-temukan-miras-alkohol-tinggi>. diakses pada tanggal 26 Juli 2020

<https://kbbi.web.id/sanksi>. diakses pada tanggal 4 januari 2021

<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/143>. diakses pada 7 januari 2021

